

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
DALAM PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN DI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

Oleh

SALSABILA SUKAMTO

NPM 2416041112



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	9
2.3 Kerangka Berpikir	12
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian	14
2.4 Hipotesis Penelitian	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Tipe Penelitian	16
3.2 Fokus Penelitian	17
3.3 Lokasi Penelitian	18
3.4 Jenis dan Sumber Data	19
3.5 Teknik Pengumpulan Data	20
3.6 Teknik Analisis Data	22
3.7 Teknik Keabsahan Data	24
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, manusia tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga nilai, sikap, dan kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan mereka berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya. Amanat konstitusi tersebut menjadi dasar moral dan yuridis bagi negara untuk menjamin bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam mengenyam pendidikan hanya karena alasan ekonomi.

Namun, fakta sosial menunjukkan bahwa beberapa anak di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Banyak anak putus sekolah karena masalah sosial ekonomi, infrastruktur pendidikan yang terbatas, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa, meskipun tingkat partisipasi siswa di sekolah terus meningkat, ribuan anak usia sekolah dasar dan menengah masih gagal melanjutkan sekolah, terutama di daerah pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah akses pendidikan belum sepenuhnya diselesaikan, terutama di wilayah yang sangat miskin.

Pemerintah mengatasi masalah ini dengan meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP), di mana Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah satu alatnya. Program ini merupakan bagian dari agenda pembangunan prioritas pendidikan nasional dan dilaksanakan sejak 2015. KIP berfokus pada membantu anak-anak

dari keluarga miskin, rentan miskin, atau yang memiliki kondisi khusus untuk melanjutkan sekolah hingga jenjang menengah atas. Melalui bantuan dana pendidikan yang diberikan langsung kepada siswa, pemerintah berusaha mengurangi biaya sekolah untuk kebutuhan pendukung, transportasi, dan perlengkapan belajar.

Kebijakan ini sangat relevan dengan misi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Program KIP diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan angka partisipasi murni sekolah, menekan angka putus sekolah, serta mendorong pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, KIP merupakan instrumen kebijakan yang menjembatani kesenjangan antara cita-cita keadilan sosial dan realitas ekonomi masyarakat.

Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar. Sebagai kabupaten dengan wilayah cukup luas dan penduduk terbanyak di Provinsi Lampung, daerah ini menghadapi tantangan besar dalam bidang pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, angka partisipasi sekolah di jenjang SMP masih berkisar 91%, sedangkan di jenjang SMA/SMK hanya sekitar 77%. Banyak anak usia sekolah menengah terpaksa bekerja membantu orang tua di sektor pertanian atau buruh harian lepas karena keterbatasan ekonomi keluarga. Situasi tersebut menunjukkan masih adanya hambatan serius dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di wilayah ini.

Diharapkan masalah ini akan diselesaikan dengan kehadiran KIP. Namun, ada beberapa hambatan yang masih menghalangi pelaksanaan program ini di Kabupaten Lampung Tengah dalam kenyataannya. Hasil wawancara awal dengan sekolah dan masyarakat menunjukkan sejumlah masalah. Ini termasuk pencairan dana yang tertunda, sasaran yang tidak sesuai dengan penerima, dan kurangnya informasi tentang cara penggunaan dana bantuan. Selain itu, tidak ada koordinasi

yang baik antara sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga terkait seperti bank penyalur dan Kementerian Sosial. Akibatnya, proses verifikasi data calon penerima masih terjadi di beberapa sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik, termasuk KIP, bergantung pada isi dan pelaksanaan kebijakan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, seperti komunikasi antaraktor, sumber daya yang tersedia, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Teori George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa jika keempat faktor tersebut tidak berjalan harmonis, maka kebijakan yang baik sekalipun tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks KIP, koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menjadi elemen krusial yang menentukan kelancaran program. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi ekonomi keluarga calon penerima juga turut berpengaruh terhadap ketepatan sasaran kebijakan.

Sangat penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kebijakan KIP diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah karena ini dapat menunjukkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan yang masih berjuang untuk memperluas akses pendidikan. Penelitian ini tidak hanya membahas seberapa efektif program administratif, tetapi juga bagaimana masyarakat menerima, menjalankan, dan merasakan manfaat dari kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang proses implementasi, bagaimana para aktor kebijakan berinteraksi, dan hal-hal yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program KIP di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program KIP di Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan program KIP terhadap peningkatan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.

Secara khusus, tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Lampung Tengah, mulai dari tahap sosialisasi, pendataan, penyaluran bantuan, hingga pemanfaatan dana oleh peserta didik penerima manfaat. Melalui pemahaman proses ini, diharapkan dapat tergambar sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan pedoman nasional.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program KIP di lapangan. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi antaraktor pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, struktur organisasi pelaksana, serta sikap atau komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan.
3. Menganalisis dampak program KIP terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya dalam hal keberlanjutan sekolah, motivasi belajar siswa, serta penurunan angka putus sekolah di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Analisis ini penting untuk menilai

efektivitas kebijakan dan memberikan masukan bagi peningkatan kualitas implementasi di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam tiga aspek utama, yaitu teoritis, praktis, dan kebijakan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu kebijakan publik dan administrasi negara, terutama dalam konteks implementasi kebijakan sosial di sektor pendidikan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas program bantuan pemerintah berbasis pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi Dinas Pendidikan dan pihak sekolah di Kabupaten Lampung Tengah mengenai kondisi aktual pelaksanaan program KIP. Temuan lapangan dapat membantu pelaksana kebijakan untuk memperbaiki mekanisme pendataan, penyaluran, serta pengawasan program agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

3. Manfaat Kebijakan

Secara kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan strategi implementasi kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan program bantuan pendidikan lainnya yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat di daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam memberikan landasan empiris bagi penelitian ini. Kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya membantu peneliti memahami sejauh mana topik implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah dikaji oleh para peneliti lain, baik dari sisi teori, pendekatan, maupun hasil temuan di lapangan. Melalui telaah ini, peneliti dapat melihat pola umum, kesamaan, dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang sedang dijalankan, sehingga penelitian ini memiliki arah yang lebih jelas dan kontribusi ilmiah yang lebih kuat.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia di bidang pendidikan yang diluncurkan sejak tahun 2014. Tujuan utama program ini adalah membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani oleh biaya sekolah. Karena sifatnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, banyak penelitian telah dilakukan untuk menilai efektivitas, pelaksanaan, dan dampak program ini di berbagai daerah. Namun, hasil penelitian yang berbeda-beda menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak selalu berjalan seragam. Beberapa daerah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah, sedangkan daerah lain menghadapi kendala administratif, keterbatasan sosialisasi, dan permasalahan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Kajian terhadap penelitian terdahulu juga penting untuk mengidentifikasi research gap atau celah penelitian yang belum banyak dikaji sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek evaluasi program dan efektivitas bantuan, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Daerah ini

memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam, termasuk perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah, akses pendidikan yang belum merata, serta kapasitas administrasi daerah yang bervariasi. Oleh karena itu, hasil penelitian di wilayah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai dinamika implementasi kebijakan KIP dalam konteks lokal. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Sari (2019)	Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Kota Yogyakarta	Kualitatif (Deskriptif)	Pelaksanaan KIP sudah baik dari sisi administrasi, namun masih terkendala verifikasi data penerima.	Menjadi dasar untuk melihat pentingnya akurasi data penerima di daerah penelitian ini.
2	Putra (2020)	Evaluasi Pelaksanaan Program KIP di Kabupaten Sleman	Kualitatif (Studi Kasus)	Program KIP meningkatkan angka partisipasi sekolah, namun sosialisasi program masih rendah.	Relevan untuk menilai bagaimana sosialisasi KIP di Lampung Tengah dapat memengaruhi efektivitas implementasi.
3	Rahmawati (2021)	Analisis Implementasi KIP dalam Pemerataan Akses Pendidikan di Kabupaten Jember	Kualitatif (Fenomenologi)	Program KIP membantu keluarga miskin menyekolahkan anaknya, tetapi masih ada kendala pencairan dana.	Memberikan gambaran hambatan teknis dalam proses penyaluran bantuan pendidikan.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
4	Nuraini (2022)	Dampak Kartu Indonesia Pintar terhadap Keberlanjutan Pendidikan di Kecamatan Soppeng	Kualitatif (Deskriptif)	KIP berpengaruh positif terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak miskin, terutama jenjang SMP.	Relevan dalam mengkaji dampak sosial program di tingkat mikro (rumah tangga).
5	Hasanah (2023)	Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan KIP di Kabupaten Garut	Kualitatif (Studi Kasus)	Koordinasi antarinstansi menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi program.	Menjadi dasar bagi analisis peran dinas pendidikan dan sekolah di Lampung Tengah.
6	Prasetyo (2024)	Pelaksanaan Program KIP dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas	Kualitatif (Deskriptif)	KIP meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar, namun pelaporan dana masih belum optimal.	Memberikan referensi mengenai efektivitas KIP terhadap pemerataan pendidikan dasar.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti aspek pelaksanaan teknis dan dampak sosial KIP, baik dalam hal peningkatan angka partisipasi sekolah maupun pemerataan kesempatan belajar bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di daerah Jawa dan belum banyak yang secara spesifik membahas implementasi KIP di Kabupaten Lampung Tengah, padahal daerah ini

memiliki kondisi sosial ekonomi dan geografis yang berbeda, terutama dalam hal penyebaran sekolah dan tingkat kemiskinan.

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek administratif dan dampak langsung program, sementara dimensi proses implementasi kebijakan seperti koordinasi antaraktor, efektivitas sosialisasi, dan keterlibatan masyarakat belum banyak dikaji secara mendalam. Karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut dengan menggali bagaimana proses implementasi kebijakan KIP berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan akses pendidikan di daerah tersebut.

2.2 Landasan Teori

Kajian teori dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan landasan konseptual yang kuat dalam memahami bagaimana kebijakan publik, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), diimplementasikan dalam konteks lokal. Pemahaman tentang teori kebijakan publik diperlukan karena program seperti KIP merupakan hasil dari proses kebijakan pemerintah yang kompleks, melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi. Oleh karena itu, pembahasan teori dalam penelitian ini disusun secara komprehensif dengan menguraikan teori tingkat umum (*grand theory*), teori tingkat menengah (*middle-range theory*), hingga teori terapan (*applied theory*) yang berhubungan langsung dengan konteks penelitian.

Kebijakan publik secara umum dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Menurut Thomas R. Dye (2017), kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*,” yang berarti apa pun yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah akan berdampak pada masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan publik mencerminkan pilihan pemerintah dalam menanggapi masalah sosial, seperti rendahnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Sedangkan menurut Dunn

(2018), kebijakan publik merupakan keputusan yang bersifat normatif dan instrumental, yang bertujuan mencapai tujuan sosial tertentu melalui proses analisis kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik bukan hanya keputusan politik, melainkan juga instrumen rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka teori besar (*grand theory*), kebijakan publik juga dapat dijelaskan melalui teori sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton. Menurut Easton, kebijakan publik adalah keluaran (*output*) dari sistem politik yang menerima masukan (*input*) berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Kebijakan kemudian diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan menghasilkan dampak (*outcome*) yang selanjutnya menjadi masukan baru bagi sistem. Dalam konteks Kartu Indonesia Pintar, kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat terhadap pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah sebagai aktor utama sistem politik kemudian merumuskan kebijakan melalui serangkaian mekanisme administratif dan mengimplementasikannya melalui instansi pelaksana di tingkat pusat dan daerah.

Selanjutnya, teori tingkat menengah (*middle-range theory*) yang relevan dengan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting karena keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan seberapa jelas tujuan kebijakan disampaikan kepada pelaksana di lapangan. Sumber daya mencakup ketersediaan dana, tenaga manusia, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Disposisi berhubungan dengan kemauan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk menjalankan program sesuai tujuan. Sementara struktur birokrasi meliputi pembagian kewenangan, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi antarinstansi.

Model Edwards III banyak digunakan dalam penelitian implementasi kebijakan karena sederhana dan aplikatif, serta mampu menjelaskan berbagai dinamika yang muncul di lapangan. Dalam konteks KIP, empat faktor tersebut juga menentukan efektivitas pelaksanaan program. Misalnya, sosialisasi yang tidak merata dapat menyebabkan masyarakat kurang memahami syarat dan mekanisme program, keterbatasan anggaran dapat menghambat penyaluran bantuan, sikap pelaksana yang kurang proaktif dapat memperlambat proses validasi data penerima, dan struktur birokrasi yang berbelit dapat menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab antarinstansi.

Selain model Edwards, teori implementasi lain yang juga relevan adalah model Van Meter dan Van Horn (1975). Mereka menekankan bahwa implementasi dipengaruhi oleh hubungan antara kebijakan dengan kinerja pelaksanaannya, yang ditentukan oleh enam variabel: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial ekonomi dan politik. Teori ini menekankan pentingnya kesesuaian antara isi kebijakan dan kondisi lingkungan di mana kebijakan tersebut diterapkan. Dalam konteks Lampung Tengah, teori ini membantu menjelaskan bagaimana faktor lingkungan sosial—seperti tingkat kemiskinan, letak geografis, dan budaya pendidikan masyarakat—dapat memengaruhi implementasi KIP.

Selain dua teori tersebut, implementasi kebijakan juga dapat dilihat melalui perspektif Merilee S. Grindle (1980) yang memandang implementasi sebagai proses politik dan administratif yang dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Grindle menegaskan bahwa isi kebijakan meliputi kepentingan yang terlibat, jenis manfaat yang dihasilkan, serta sejauh mana kebijakan tersebut diubah oleh pelaksana. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, karakteristik lembaga pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Model ini sangat berguna untuk menjelaskan realitas implementasi KIP yang melibatkan banyak aktor mulai dari pemerintah pusat, dinas pendidikan,

sekolah, hingga masyarakat penerima manfaat, dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam.

Jika dikaitkan dengan teori terapan (applied theory), maka implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dapat dianalisis melalui konsep pemerataan pendidikan (educational equity) dan aksesibilitas pendidikan. Konsep pemerataan pendidikan menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa terhalang oleh faktor ekonomi, geografis, atau sosial. Menurut UNESCO (2022), akses pendidikan yang merata merupakan kunci keberhasilan pembangunan manusia. Dalam konteks Indonesia, KIP menjadi instrumen kebijakan yang dirancang untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

Melalui teori pemerataan pendidikan, dapat dipahami bahwa keberhasilan KIP tidak hanya diukur dari jumlah penerima bantuan, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menghapus hambatan ekonomi dan sosial yang menghalangi anak-anak miskin untuk bersekolah. Program ini memiliki makna strategis karena menjembatani kesenjangan antara hak konstitusional warga negara dan realitas sosial yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar konseptual yang menjelaskan hubungan antara permasalahan, teori, dan fokus penelitian. Penelitian ini berangkat dari fenomena rendahnya akses pendidikan anak-anak dari keluarga miskin di Kabupaten Lampung Tengah. Kondisi ini menjadi latar belakang munculnya kebijakan publik berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk membantu peserta didik dari kalangan kurang mampu agar tetap dapat bersekolah tanpa terkendala masalah ekonomi.

Dalam konteks implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan kerangka teori dari George C. Edwards III yang menyoroti empat dimensi penting dalam

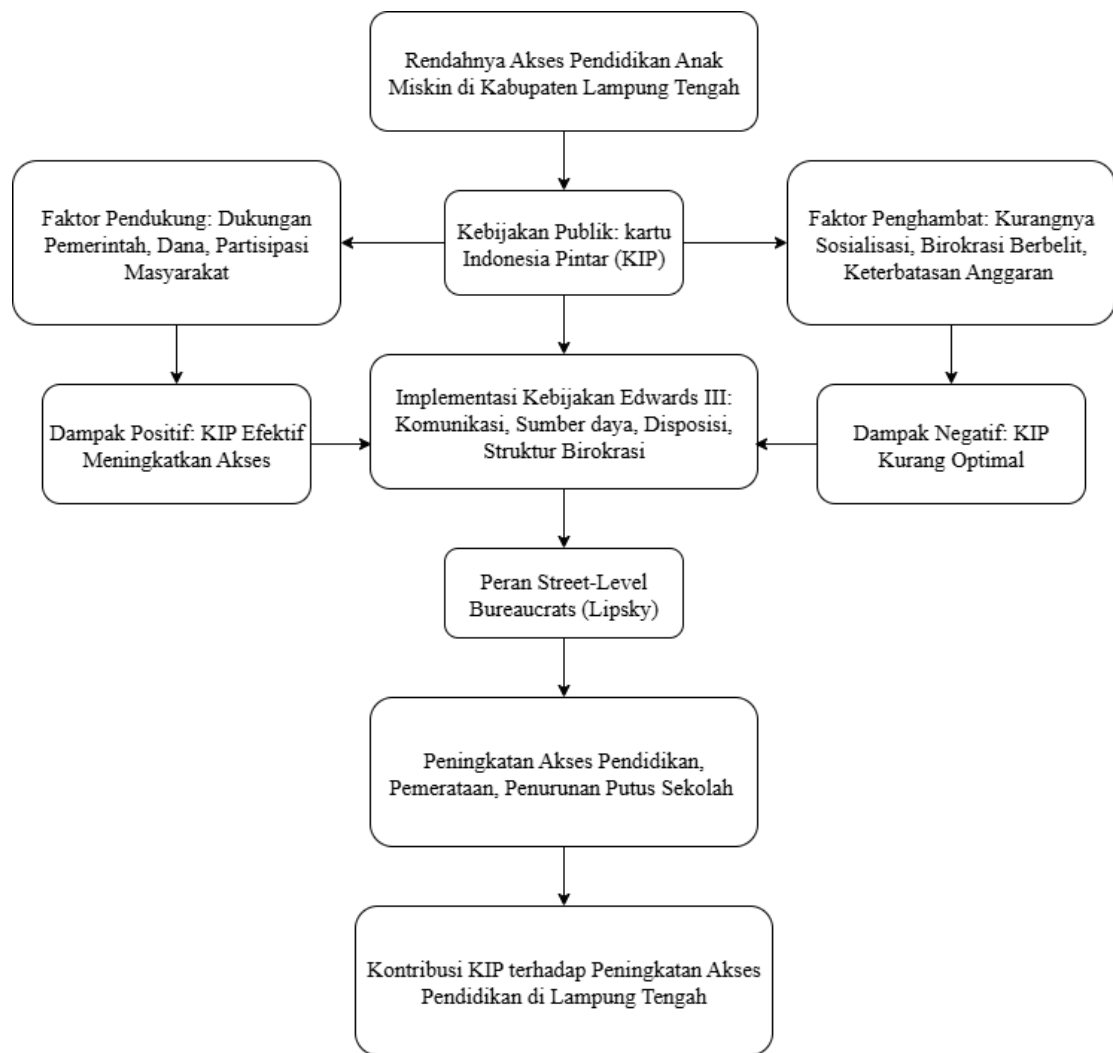
keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi acuan dalam menganalisis sejauh mana kebijakan KIP dijalankan secara efektif di lapangan, khususnya oleh para pelaksana di tingkat bawah seperti sekolah dan dinas pendidikan daerah.

Selain itu, kerangka berpikir ini juga mengadopsi konsep street-level bureaucracy dari Michael Lipsky, yang menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat bawah memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini, guru, kepala sekolah, dan aparat dinas pendidikan menjadi aktor penting yang berinteraksi langsung dengan masyarakat penerima manfaat KIP. Mereka tidak hanya menjalankan perintah administratif, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap kebijakan sesuai dengan konteks lokal dan keterbatasan sumber daya yang ada.

Secara konseptual, pelaksanaan KIP diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan melalui dukungan faktor-faktor pendukung seperti dukungan pemerintah, alokasi dana yang memadai, serta partisipasi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini juga menghadapi berbagai faktor penghambat, seperti kurangnya sosialisasi program, birokrasi yang berbelit, serta keterbatasan anggaran, yang dapat menghambat efektivitas kebijakan di tingkat pelaksana.

Hasil dari implementasi kebijakan tersebut kemudian menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif mencakup meningkatnya akses pendidikan bagi siswa miskin, pemerataan kesempatan belajar, serta penurunan angka putus sekolah. Sementara itu, dampak negatif muncul ketika pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi antar lembaga atau rendahnya efektivitas penyaluran dana.

Berikut adalah gambar kerangka berpikir penelitian:



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar tersebut menunjukkan alur logis penelitian, dimulai dari permasalahan utama yaitu rendahnya akses pendidikan anak miskin, kemudian diikuti dengan intervensi kebijakan publik berupa KIP, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model Edwards III dan konsep street-level bureaucracy (Lipsky) untuk memahami dinamika pelaksanaan di tingkat bawah.

Akhir dari alur kerangka berpikir ini menggambarkan bahwa efektivitas implementasi KIP akan menghasilkan peningkatan akses pendidikan, pemerataan, dan penurunan angka putus sekolah, yang pada akhirnya menunjukkan kontribusi nyata KIP terhadap peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.

2.4 Hipotesis

Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak selalu bersifat formal seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan berupa dugaan sementara atau proposisi awal yang akan diuji melalui pengumpulan dan analisis data di lapangan. Hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya.

Adapun dugaan sementara yang menjadi arah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Lampung Tengah berjalan belum optimal karena masih terdapat kendala dalam komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi antarinstansi.
2. Faktor sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat turut memengaruhi efektivitas implementasi KIP, terutama dalam hal pemanfaatan bantuan untuk keberlanjutan pendidikan anak.
3. Meskipun menghadapi kendala administratif dan teknis, kebijakan KIP secara umum memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin di Kabupaten Lampung Tengah.

Hipotesis ini akan diuji melalui proses analisis data kualitatif dengan menggali pandangan dari berbagai pihak, seperti pihak Dinas Pendidikan, sekolah, orang tua siswa, dan penerima manfaat program KIP. Hasil analisis diharapkan dapat memperkuat atau memodifikasi hipotesis awal tersebut sesuai dengan temuan empiris di lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berlangsung dalam konteks sosial yang nyata, bukan sekadar mengukur hasil secara kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, pengalaman, serta dinamika interaksi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KIP di Kabupaten Lampung Tengah.

Metode kualitatif digunakan karena sifat permasalahan penelitian ini berhubungan erat dengan fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan penjelasan kontekstual. Implementasi kebijakan publik, seperti halnya KIP, tidak hanya ditentukan oleh aturan formal atau prosedur administrasi, tetapi juga oleh faktor manusia, kelembagaan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, pemahaman terhadap fenomena implementasi KIP memerlukan pendekatan yang mampu menangkap realitas sosial sebagaimana adanya (natural setting).

Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis secara statistik, melainkan menggambarkan dan menganalisis bagaimana proses implementasi berlangsung, siapa saja yang berperan di dalamnya, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang konteks pelaksanaan KIP di Lampung Tengah yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pusat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah arah utama atau ruang lingkup penelitian yang akan diteliti agar penelitian tetap terarah dan tidak melebar. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian dapat berubah sesuai dengan data dan temuan di lapangan. Namun, pada tahap awal, peneliti tetap menetapkan fokus untuk proses pengumpulan dan analisis data.

Fokus utama penelitian ini adalah implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah. Fokus ini mencakup tiga aspek besar, yaitu: (1) proses implementasi kebijakan KIP, (2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta (3) dampak program terhadap akses pendidikan bagi masyarakat penerima manfaat.

1. Proses Implementasi Kebijakan KIP

Peneliti memusatkan perhatian pada bagaimana kebijakan KIP diterapkan di tingkat daerah, terutama pada satuan pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Lampung Tengah. Proses implementasi ini mencakup tahapan penyaluran dana, mekanisme pendataan siswa penerima, serta koordinasi antara dinas pendidikan, sekolah, dan pihak orang tua. Dalam aspek ini, peneliti ingin memahami bagaimana instruksi dan kebijakan dari pemerintah pusat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Setiap kebijakan publik tidak pernah lepas dari kendala dan peluang. Oleh karena itu, penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi KIP. Faktor pendukung dapat berupa komitmen pemerintah daerah, kesiapan sekolah, keterlibatan masyarakat, serta kelancaran administrasi dan pendanaan. Sementara faktor penghambat bisa berupa keterlambatan penyaluran dana,

kesalahan data penerima, kurangnya sosialisasi, atau keterbatasan sumber daya manusia di sekolah.

3. Dampak Kebijakan KIP terhadap Akses Pendidikan

Fokus lain dari penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana kebijakan KIP berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Lampung Tengah. Aspek ini mencakup pengaruh bantuan terhadap keberlanjutan sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta motivasi belajar siswa penerima manfaat. Peneliti juga menelusuri bagaimana persepsi para penerima manfaat terhadap manfaat bantuan ini dan sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi ekonomi.

Selain ketiga fokus utama di atas, penelitian ini juga melihat aspek sosial dan kelembagaan dari pelaksanaan program KIP. Dimensi-dimensi ini termasuk kerja sama antarinstansi, peran kepala sekolah dalam memastikan sasaran bantuan yang tepat, dan bagaimana kondisi sosialekonomi masyarakat memengaruhi efektivitas kebijakan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar yang cukup tinggi di Provinsi Lampung, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Kabupaten ini memiliki karakteristik geografis yang luas dan beragam, terdiri atas wilayah perkotaan, pedesaan, dan daerah terpencil. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan akses terhadap layanan pendidikan, baik dari segi jarak sekolah, sarana prasarana, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Oleh karena itu, Lampung Tengah menjadi lokasi yang representatif untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan pendidikan seperti KIP berjalan di daerah dengan kompleksitas sosial dan geografis yang tinggi.

Secara administratif, penelitian difokuskan pada beberapa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang berada di kecamatan dengan jumlah penerima KIP cukup banyak. Sekolah-sekolah ini menjadi tempat pengumpulan data melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, serta siswa penerima manfaat. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan setempat untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan program secara keseluruhan.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber relevan untuk menjawab fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah. Data kualitatif yang dikumpulkan berupa kata-kata, deskripsi, dan penjelasan yang mencerminkan pandangan serta pengalaman informan mengenai pelaksanaan program tersebut. Menurut Sugiyono (2018), data kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi makna yang muncul dari perilaku, tindakan, maupun kebijakan yang diamati. Oleh karena itu, jenis data ini dianggap paling tepat untuk menggambarkan bagaimana kebijakan KIP diterapkan dalam konteks daerah yang memiliki kompleksitas sosial dan ekonomi seperti Lampung Tengah.

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan observasi mendalam serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Data primer ini menunjukkan perspektif, persepsi, dan pengalaman langsung dari para pelaku kebijakan, termasuk pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah,

kepala sekolah, guru, siswa penerima manfaat, dan orang tua siswa. Dengan menggunakan data ini, peneliti dapat menggambarkan realitas sosial secara keseluruhan, termasuk tantangan dan kesuksesan yang dialami selama pelaksanaan kebijakan.

Data sekunder, di sisi lain, berasal dari dokumen resmi pemerintah, seperti laporan tahunan Dinas Pendidikan, petunjuk teknis (juknis) KIP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan data statistik pendidikan daerah. Sumber-sumber tertulis ini membantu peneliti memahami konteks dan pelaksanaan kebijakan. Peneliti juga menggunakan literatur ilmiah seperti buku, jurnal penelitian, artikel akademik, dan berita resmi yang berkaitan dengan topik penelitian mereka. Selain memberikan latar belakang kebijakan secara konseptual dan administratif, data sekunder ini berguna untuk membandingkan hasil lapangan.

Sumber data penelitian ini dipilih secara purposive, artinya informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan KIP. Ini dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih relevan dan mendalam. Dengan menggunakan pendekatan purposive ini, peneliti dapat memperoleh data yang luas dan relevan tentang individu-individu yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan, seperti pejabat Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program bantuan; kepala sekolah yang mengelola data penerima manfaat; guru yang membantu dalam proses verifikasi dan sosialisasi program; dan orang tua dan siswa program KIP.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada ketepatan dan kedalaman data yang diperoleh. Untuk memperoleh data yang relevan dan komprehensif, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu

agar mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses implementasi Kartu Indonesia Pintar di daerah penelitian.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semiterstruktur. Bentuk wawancara ini memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalamannya secara bebas dan mendalam. Wawancara dilakukan terhadap beberapa kelompok informan, seperti pejabat Dinas Pendidikan yang menangani program KIP, kepala sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA penerima bantuan, guru yang terlibat dalam proses pendataan dan penyaluran dana, serta siswa dan orang tua penerima manfaat. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha memahami bagaimana mekanisme implementasi kebijakan dijalankan di lapangan, kendala apa yang dihadapi, dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak penerima KIP. Hasil wawancara kemudian ditranskripsi secara rinci dan dianalisis untuk menemukan pola-pola tematik yang relevan dengan fokus penelitian.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara nyata bagaimana pelaksanaan program KIP berlangsung di lingkungan sekolah dan bagaimana interaksi antaraktor yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif, yaitu peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati, tetapi hanya mengamati dari luar untuk memperoleh data yang objektif. Melalui observasi, peneliti mencatat berbagai hal seperti aktivitas guru dalam mengelola administrasi bantuan, interaksi antara pihak sekolah dengan siswa penerima manfaat, serta situasi sosial di sekolah yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Catatan lapangan yang dihasilkan dari observasi ini digunakan sebagai bahan penting dalam analisis data untuk memperkuat hasil wawancara.

Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi untuk melengkapi dan memverifikasi data yang mereka peroleh selain kedua metode di atas.

Pengumpulan berbagai dokumen resmi dan nonresmi yang berkaitan dengan pelaksanaan program KIP termasuk rekaman komunikasi antarinstansi, surat keputusan, petunjuk teknis, notulen rapat, laporan penyaluran dana, dan data daftar penerima bantuan. Dokumen ini menyediakan informasi administratif penting dan membantu peneliti memahami alur pelaksanaan kebijakan secara sistematis. Dokumen juga berfungsi sebagai bukti empiris yang memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Ketiga metode ini bekerja sama dan bekerja sama. Sementara dokumentasi memberikan bukti konkret pelaksanaan kebijakan, hasil wawancara memberikan data tentang pengalaman subjektif informan, dan observasi menunjukkan perilaku dan keadaan nyata di lapangan. Dengan menggabungkan ketiganya, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang penggunaan KIP sebagai kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lampung Tengah.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang berkesinambungan dan berlangsung sejak awal penelitian hingga tahap akhir penulisan laporan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).

Pertama, reduksi data dilakukan untuk menyaring, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah data terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menelaah seluruh informasi yang diperoleh, kemudian menyeleksi bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Reduksi data membantu peneliti dalam mengorganisir data yang melimpah menjadi lebih terarah, sehingga

hanya informasi yang benar-benar penting yang dianalisis lebih lanjut. Dalam tahap ini, peneliti membuat kode atau kategori tematik, seperti aspek pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, dampak terhadap akses pendidikan, dan peran berbagai aktor kebijakan.

Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi ke dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti uraian naratif, tabel, atau matriks tematik. Tujuan tahap ini adalah untuk mempermudah peneliti melihat hubungan antar kategori dan pola yang muncul dari data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bukan sekadar memaparkan fakta, tetapi juga menafsirkan maknanya berdasarkan konteks lapangan. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan hasil temuan secara deskriptif dengan menautkannya pada teori implementasi kebijakan publik dan prinsip keadilan pendidikan.

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap di mana peneliti menginterpretasikan makna data yang telah dianalisis untuk menemukan pola, hubungan sebab-akibat, serta pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan KIP. Proses ini tidak dilakukan sekali di akhir, tetapi secara berulang sepanjang penelitian berlangsung. Setiap kesimpulan sementara akan diverifikasi kembali dengan data lapangan tambahan atau triangulasi sumber untuk memastikan validitasnya.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak bersifat linier, tetapi interaktif. Setiap tahapan dapat saling memengaruhi dan dilakukan secara simultan. Misalnya, ketika peneliti menemukan data baru selama wawancara, proses reduksi dan interpretasi dapat diperbarui. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat fleksibel dan berkembang seiring kedalaman pemahaman peneliti terhadap konteks sosial yang diteliti.

Hasil analisis data diinterpretasikan menggunakan teori implementasi kebijakan publik, terutama model Edward III (1980) yang menekankan empat variabel utama dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya,

disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis ini membantu peneliti menjelaskan secara konseptual bagaimana kebijakan KIP dijalankan serta faktor apa saja yang mendukung atau menghambat keberhasilannya.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk menjamin kredibilitas dan keandalan hasil penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan uji validitas dan reliabilitas statistik, penelitian kualitatif menekankan pada kepercayaan (trustworthiness) terhadap data yang dikumpulkan dan ditafsirkan. Menurut Lincoln dan Guba (1985), terdapat empat kriteria utama untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

Pertama, credibility (kredibilitas) berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya oleh pihak lain. Untuk mencapai kredibilitas, peneliti melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Misalnya, hasil wawancara dengan pihak sekolah akan dibandingkan dengan data dokumen program serta hasil observasi lapangan. Selain triangulasi, peneliti juga melakukan member check, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Dengan cara ini, data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pandangan dan pengalaman informan.

Kedua, transferability (keteralihan) menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang serupa. Untuk itu, peneliti menyajikan deskripsi yang tebal (thick description) tentang konteks sosial dan kebijakan KIP di Lampung Tengah, termasuk karakteristik wilayah, struktur pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan uraian yang rinci, pembaca dapat menilai apakah temuan penelitian ini relevan dengan konteks daerah lain.

Ketiga, dependability (kebergantungan) berhubungan dengan konsistensi proses penelitian. Untuk menjamin hal ini, peneliti menyimpan seluruh catatan

lapangan, transkrip wawancara, dan hasil observasi sebagai jejak audit (audit trail). Jejak audit ini penting agar proses penelitian dapat ditelusuri kembali oleh peneliti lain jika diperlukan. Selain itu, peneliti juga menjaga konsistensi dalam penggunaan metode pengumpulan data dan analisis agar tidak terjadi bias interpretasi.

Keempat, confirmability (kepastian) mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diverifikasi secara objektif. Peneliti berupaya menjaga sikap netral dengan tidak memaksakan asumsi pribadi terhadap data yang diperoleh. Semua temuan didasarkan pada bukti empiris yang dapat diperiksa, bukan opini subjektif. Peneliti juga mencatat refleksi diri (reflexive notes) untuk menyadari potensi bias selama proses penelitian.

Dengan penerapan keempat kriteria tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, dapat dipercaya, dan menggambarkan kondisi implementasi Kartu Indonesia Pintar secara objektif di Kabupaten Lampung Tengah.

Selain empat kriteria utama di atas, peneliti juga memperhatikan etika penelitian sebagai bagian dari keabsahan data. Sebelum melakukan wawancara atau observasi, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada pihak berwenang dan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya, dan partisipasi mereka bersifat sukarela. Dengan demikian, proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2018). *Public Policymaking: An Introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Astuti, S., & Wulandari, N. (2021). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(2), 145–160.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Edwards III, G. C. (2019). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fathurrahman, A., & Mahendra, D. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program KIP dalam Pemerataan Akses Pendidikan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 34–49.
- Handayani, M., & Prasetyo, B. (2020). Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program KIP di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 8(3), 215–230.
- Kurniawati, L., & Rahayu, S. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar dalam Meningkatkan Akses Pendidikan. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(2), 121–138.
- Lestari, R., & Putra, E. (2023). Street-Level Bureaucracy dan Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Administrasi Negara Indonesia*, 10(1), 1–16.
- Lipsky, M. (2019). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis, dan Manajemen Kebijakan Publik di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Nuraini, D., & Yulianto, H. (2021). Tantangan Implementasi Kebijakan Publik di Era Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Governance*, 7(4), 299–312.

Parsons, W. (2017). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing.

Rahmawati, I., & Hidayat, A. (2022). Efektivitas Kartu Indonesia Pintar di Daerah Pedesaan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 11(1), 77–93.

Sari, T., & Mulyono, B. (2020). Pengaruh Sosialisasi terhadap Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan*, 5(3), 182–197.

Subarsono, A. G. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wahyudi, D., & Utami, P. (2023). Analisis Implementasi Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 64–80.

Yuliana, F., & Syafitri, A. (2021). Komunikasi Kebijakan dan Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 101–118.